

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Agustino, L. (2008). Dasar-dasar kebijakan publik. *Bandung: alfabeta*.

Bogdan & Taylor. (1992). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif, Suatu Pendekatan Fenomenologis Terhadap Ilmu-Ilmu Sosial*.

Edward III, George C dalam Tachjan (2006). Implementasi Kebijakan Publik .
Bandung: AIPI

Randall B. Repley and Grace A. Franklin. (1986). *Policy Implementasi and Bureacracy. Chicago: The Dorsey Press*.

Sugiyono, Prof. Dr. (2010). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabet

Jurnal:

Akib, H. (2010). Implementasi kebijakan: apa, mengapa, dan bagaimana. *Jurnal Administrasi Publik, 1(1)*, 1-11.

Caesaringi, I., Harsasto, P., & Manar, D. G. (2017). Reformasi Birokrasi Kota Tegal (Studi Kasus Zona Integritas Bebas Korupsi dan Birokrasi Bersih BP2T dan RSUD Kardinah). *Journal of Politic and Government Studies, 6(03)*, 2. Article 03.

Damayanti, I. (2022). *Strategi Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Surakarta Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Tahun 2021*. 6(1), 6-7. <https://ejurnal.unisri.ac.id/index.php/sldrts/index>

- Fajrin, R. M., & Astuti, P.-. (2022). *Implementasi Good Corporate Governance Dalam Peningkatan Pelayanan Publik RSUD K.R.M.T. Wongsonegoro Semarang Guna Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. Journal of Politic and Government Studies, 11(3), 5. Article 3.*
- Hapsari, J., Purnaweni, H., & Priyadi, B. P. (n.d.). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Bbws Pemali Juana Semarang. 1(1), 26.*
- Nisa, N. T. (2023). *Analisis Pembangunan Zona Integritas Wilayah Bebas Dari Korupsi Terhadap Kinerja Layanan Di KPKNL Jakarta II. 2(1), 191.*
- Normajatun, N., Fibriyanita, F., & Hamdie, A. N. (2022). *Implementasi Kebijakan Pembangunan Zona Integritas Di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Banjarmasin. As-Siyasah: Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, 7(2), 89.*
<https://doi.org/10.31602/as.v7i2.6222>
- Nugroho, R. (2020). *Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm) Pada Lembaga Pelayanan Pertanahan, 6(2), 3.*
<https://doi.org/10.31227/osf.io/hqd3w>
- Purnamasari, A. (2019). *Peningkatan Pelayanan Publik RSUP Dr. Kariadi Semarang Yang Akuntabel Dan Anti Korupsi Dalam Mempertahankan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani.*

- Rachmawati, L., Nurikah, N., & Kusumaningsih, R. (2023). *Implementasi Pembangunan Zona Integritas di Banten Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM*. *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, 3(1), 95. <https://doi.org/10.51825/yta.v3i1.13152>
- Rompas, D. J. M., Pioh, N. R., & Monintja, D. (2023). *Reformasi Birokrasi Pelayanan Publik Dalam Mencapai Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbk/Wbbm) Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kotamobagu*. 3(1), 3-5. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/45321>
- Syaifulloh, M. I. N., & Wardhono, H. (2023). *Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dalam Upaya Mewujudkan Program Zona Integritas Di Samsat Manyar Surabaya*. 1(1), 28. <https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/smia/article/view/5743>
- Wibisono, S. (2022). Evaluasi Kebijakan Zona Integritas TNI AL menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani. *JiIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(10), 4315–4319. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i10.1038>
- Wihardiasty Sekar Kinasih, W. S. K., & Sujianto, S. (2022). *Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani Di Kantor Imigrasi Kelas I Tpi (Tempat Pemeriksaan Imigrasi) Pekanbaru*. *PUBLIKA : Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 8(1), 104–120. [https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8\(1\).9308](https://doi.org/10.25299/jiap.2022.vol8(1).9308)

Wilujeng, D. S., & Pramudyastuti, O. L. (2020). *Evaluasi Penerapan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (Studi Pembangunan Zona Integritas Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang)*. *Journal of Economic, Management, Accounting and Technology*, 3(2), 127–135.
<https://doi.org/10.32500/jematech.v3i2.1286>

Yolanda, R., & Hasanuddin. (2022). *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau Tahun 2019-2020*. 4(6), 81.
<https://doi.org/10.31004/jpdk.v4i6.8378>

Website:

Riswanto, N. A. (2020, February 18). *Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi dan Bersih Melayani (WBBM) di KPKNL Pamekasan*. <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/kpknl-pamekasan/baca-artikel/12980/Zona-Integritas-menuju-Wilayah-Bebas-dari-Korupsi-WBK-dan-Wilayah-Birokrasi-dan-Bersih-Melayani-WBBM-di-KPKNL-Pamekasan.html>

Galang Waluyo, K. (2022, June 30). *Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM) sebagai Wujud Good Governance*. <https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/manokwari/id/data-publikasi/artikel/3006-pembangunan-zona-integritas-menuju-wilayah->

[bebas-dari-korupsi-dan-wilayah-birokrasi-bersih-dan-melayani-wbk-wbbm-sebagai-wujud-good-governance.html](#)

Peraturan Perundang-undangan:

Pemerintah Pusat. (2002). *Undang-undang (UU) Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.*

Presiden Republik Indonesia. (2002). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.*

Presiden Republik Indonesia. (2004). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2014). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2019). *Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.*